

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa

Muhammad Nur Aziiz
Sawitri Dwi Prastiti

Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5, Malang, Indonesia, 65145
aziz.zx2002@gmail.com

Abstract

The principle of accountability in governance is the principle that guarantees that the government is responsible for a series of designed programs. The implementation of the principle of accountability can increase public confidence in the government. This study aims to explain the influence of village officials' competence, utilization of information technology and the Government's Internal Control System (SPIP) on the village fund accountability. The data was collected through questionnaires distributed to 44 village officials (who experience managing village finance for at least one year) and analyzed using regression. The results of this study indicate that the competence of village officials, the use of information technology and SPIP affect the accountability of village officials. The practical implication of this study for government officials is to improve the competence of village officials through Siskeudes training and optimize the use of information technology. Theoretically, financial accountability in the public sector can also be explained through compliance theory and ethical concepts.

Keywords: *Accountability of Village Fund, Competence of The Village Officials, Utilization of IT, Government Internal Control System*

Abstrak

Prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan adalah prinsip yang menjamin bahwa pemerintah bertanggungjawab atas serangkaian program yang berada di bawahnya. Terlaksananya prinsip akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas dana desa. Data penelitian dikumpulkan melalui angket yang disebarkan ke 44 aparat desa dan dianalisis menggunakan regresi. Aparatur desa yang menjadi sampel penelitian dipilih untuk mereka yang telah berpengalaman mengelola keuangan desa sekurang-kurangnya selama satu tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Implikasi praktis hasil penelitian ini bagi aparat pemerintahan adalah untuk meningkatkan kompetensi aparat desa melalui pelatihan Siskeudes dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Secara teoritis, akuntabilitas keuangan sektor publik dapat pula dijelaskan melalui teori kepatuhan dan konsep etika.

Kata Kunci: Akuntabilitas Dana Desa, Kompetensi Aparat Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap prinsipal (Mardiasmo, 2009). Termasuk dalam pengertian tersebut, akuntabilitas memiliki peran penting untuk menekan penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya bagi kepentingan publik (Jorge & Pattaro, 2011).

Akuntabilitas dapat digolongkan menjadi lima dimensi diantaranya: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akun-

tabilitas finansial (Rasul, 2002). Secara khusus, seiring dengan digulirkannya Permendagri No. 113/2014 Pasal 9 Ayat 2 tentang pendapatan desa yang berasal dari kelompok *transfer* yaitu jenis dana desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014) di tahun 2015, maka salah satu kewajiban administratif pemerintah desa adalah melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini tidak terlepas dari besaran dana desa yang dikucurkan dari tahun ke tahun yang mengalami kenaikan cukup signifikan hingga mencapai total triliunan rupiah atau sejumlah ratusan juta di setiap desa. Di tahun 2018, jumlah desa yang menerima alokasi transfer dana desa mencapai lebih dari 60.000 desa dengan total nominal dana desa yang dicairkan senilai kurang lebih 60 Triliun Rupiah (kemenkeu.go.id, 2018).

Dengan pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan, beberapa penelitian menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang meliputi faktor kesesuaian atas standar akuntansi yang berlaku, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan, budaya organisasi, serta kompetensi sumberdaya manusia (Febrianto, Yuniarta, & Edy Sujana, 2017; Mada, Sarifudin, 2017; Widyatama, Novita, & Diarespati, 2017; Yudianto & Sugiarti, 2017).

Secara khusus, dalam lingkup pemerintahan desa, penelitian ini bermaksud menjelaskan peranan kompetensi aparatur (Dewi, Ramadhanti, & Wiratno, 2014; Fajri, 2015; Ferina, Burhanuddin, & Lubis, 2016; Mada, Sarifudin, 2017; Makalalag, Nangoi, & Karamoy, 2017), pemanfaatan teknologi informasi (Mayowan, 2016; Yudianto & Sugiarti, 2017) dan sistem pengendalian internal (Widyatama et al., 2017; Yudianto & Sugiarti, 2017) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terdapat pada modifikasi indikator yang membentuk kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Indikator kompetensi aparatur desa pada penelitian ini mempertimbangkan ketentuan yang disebutkan pada Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2014. Begitu pula indikator pemanfaatan teknologi informasi yang mempertimbangkan diberlakukannya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), salah satunya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 247/2015. Selanjutnya, pengembangan indikator yang membentuk SPIP merujuk pula pada salah satu informasi yang tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 sebagai dasar pengembangannya.

Penelitian ini memotret persepsi aparat desa yang ada di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil wawancara pada aparat Kecamatan Sumbergempol, diperoleh penjelasan bahwa kualitas pertanggungjawaban dana desa di Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu 2017 dan 2018 relatif baik dan tidak dihasilkan temuan audit internal yang material. Selanjutnya, secara khusus, alasan pemilihan Kecamatan Sumbergempol dikarenakan jumlah desa yang berada di bawah koordinasi kecamatan ini terbanyak diantara kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung, dan desa-desa tersebut menerima transfer dana desa sebagai salah satu sumber penerimaan desa.

Mempertimbangkan keberagaman hasil penelitian sebelumnya, besaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun ke tahun, serta merujuk regulasi tentang keuangan desa sebagai informasi untuk mengembangkan indikator penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan SPIP terhadap akuntabilitas dana desa. Secara lebih detail, berikut penjelasan mengenai pembentukan hipotesis yang terdapat pada uraian tujuan penelitian tersebut.

- **Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Dana Desa.** Akuntabilitas Pengelolaan keuangan dana desa dipengaruhi oleh sumber daya manusia, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak mampu terealisasi tanpa adanya keterlibatan sumber daya manusia (Ferina, 2016). Untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan penting dilakukan serangkaian upaya diantaranya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman itu sendiri. Pentingnya kompetensi sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan desa akan mempengaruhi kualitas akuntabilitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan (Cheng, Engstrom, & Kattelus, 2002). Arti penting kompetensi sumber daya manusia bagi terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa didukung oleh hasil penelitian Yudianto & Sugiarti (2017) di desa-desa yang ada di Kabupaten Karawang. Begitu pula hasil penelitian Mada, Sarifudin (2017), R Fajri (2015), Yudianto & Sugiarti (2017), serta Ferina et al., (2016) Untuk mendukung maksud tersebut, maka hipotesis pertama yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

H_1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

- **Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Dana Desa.** Pemanfaatan teknologi informasi secara merata telah digunakan oleh setiap sektor—baik bisnis ataupun pemerintahan—untuk membantu mengadministrasikan pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif. Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik. Temuan empiris dari hasil penelitian sebelumnya mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan dari sisi keakuratan/ketepatan informasi, baik sebagai mesin multiguna maupun multi-proses. Penelitian oleh Mayowan (2016) menunjukkan bahwa terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan rendahnya kualitas layanan ke masyarakat desa. Hasil yang serupa ditunjukkan pula oleh penelitian Yudianto & Sugiarti (2017), sehingga penggunaan teknologi informasi memiliki keunggulan guna meningkatkan keakuratan dan ketepatan informasi dan mengurangi kesalahan. Rangkaian uraian tersebut menjadi dasar hipotesis kedua pada penelitian ini, yaitu:
 H_2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- **Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Akuntabilitas Dana Desa.** Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah sistem pengendalian intern (Widyatama et al., 2017). Pengendalian internal merupakan cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Selain itu, pengendalian intern juga memiliki peran penting untuk mencegah ataupun mendeteksi *fraud*. Salah satu tujuan umum manajemen saat merancang sistem pengendalian internal adalah menjaga reliabilitas informasi keuangan (A Arens, J Elder, & S Beasley, 2016). Selanjutnya, penelitian Yudianto & Sugiarti (2017) tentang sistem pengendalian intern pada pemerintah desa di Kabupaten Karawang menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern yang dijalankan belum memadai sehingga mempengaruhi kualitas keandalan laporan keuangan. Untuk itu, rumusan hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah:
 H_3 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

METODE

Penelitian eksplanasi ini bermaksud menjelaskan pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap akuntabilitas dana desa. Definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Akuntabilitas dana desa:** Merujuk pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya yang mengambil penjelasan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi relevan, dapat dibandingkan, andal, mudah dipahami.
- **Kompetensi aparatur desa:** Merujuk pada angket yang dikembangkan Delanno & Deviani (2013) dan UU No. 6 Tahun 2014. Indikator kompetensi aparatur desa dikelompokkan untuk mengukur perihal tanggung jawab, pelatihan, dan pengalaman.
- **Pemanfaatan teknologi informasi:** Merujuk pada angket yang dikembangkan oleh Sukirman, Havid Sularso (2013), Suyanto (2005), dan PMK No. 247/2015. Variabel ini mengukur perihal *hardware*, yaitu perangkat komputer dan jaringan internet.
- **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):** Merujuk pada Pasal 3 Ayat 1 PP No. 60 Tahun 2008 yang mengukur tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung yang teridentifikasi sejumlah 190 aparatur desa dari 17 desa. Teknik sampling menetapkan serangkaian kriteria yaitu memilih delapan desa penerima dana desa terbesar di tahun 2017-2018 dengan jumlah aparatur desa sebanyak 56 orang. Alasan memilih delapan desa penerima dana desa terbesar dikarenakan keterbatasan sumber daya peneliti. Selanjutnya, responden yang dipilih adalah aparatur desa yang mengetahui proses pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan/kaur, atau kepala

dusun/kasun. Aparat desa yang terpilih setidaknya-tidaknyanya terlibat dalam administrasi dana desa minimal satu tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, sebanyak 44 angket dapat diolah lebih lanjut dan sisanya sebanyak 12 angket tidak terisi lengkap, tidak kembali, dan tidak sesuai kriteria. Periode penyebaran angket ke aparatur desa dilaksanakan sepanjang 22 Mei sampai 5 Juni 2018. Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan serangkaian teknik analisis regresi berganda. Analisis tersebut digunakan untuk melihat nilai signifikansi F, nilai signifikansi t, koefisien determinasi, dan sumbangan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebelum menyebarkan angket ke aparatur desa, dilakukan uji pendahuluan kualitas angket dengan responden mahasiswa Akuntansi semester 5 dan telah menempuh mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Uji pendahuluan dilakukan dengan mempertimbangkan serangkaian penyesuaian indikator yang merujuk pada regulasi yang mengatur tentang pemerintahan desa dan Siskeudes. Hasil uji pendahuluan atas angket menunjukkan nilai validitas dan reliabilitas yang memadai dengan nilai validitas setiap indikator memiliki nilai t hitung melebihi t table. Angket juga dinilai valid karena masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach alpha* lebih dari 0,8. Uji pendahuluan dilaksanakan di awal bulan Mei 2018. Deskripsi variabel berdasarkan jawaban responden menunjukkan hasil seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Variabel

Variabel	N	Min	Max	Mean	SD
Akuntabilitas	44	30	45	40,16	4,215
Kompetensi aparatur	44	25	40	33,34	4,097
Pemanfaatan TI	44	28	45	38,80	4,327
SPIP	44	25	50	40,68	6,590

Jawaban responden untuk variabel akuntabilitas menunjukkan nilai rata-rata total 40,16 dan jumlah indikator adalah sembilan *item*, sehingga kecenderungan jawaban responden atas setiap indikator senilai 4,5. Artinya responden menyepakati bahwa Informasi Keuangan dinilai berkualitas jika memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selanjutnya, variabel kompetensi dengan nilai rata-rata total 33,34 dan jumlah indikator sebanyak delapan pernyataan menghasilkan rata-rata jawaban senilai 4,2 atau berada pada pilihan jawaban sering. Arti jawaban ini menegaskan bahwa responden telah sering mendapatkan informasi tanggung jawab, pelatihan, dan pengalaman administratif apa yang harus dilaksanakan jika mendapatkan dana desa. Adapun untuk variabel teknologi informasi (TI) diperoleh rata-rata total senilai 38,80 dan jumlah indikator sebanyak sembilan *item* menghasilkan rata-rata jawaban responden senilai 4,3 atau sering. Artinya, responden meyakini pentingnya pemanfaatan TI untuk membantu pekerjaan mereka. Variabel SPIP menunjukkan nilai rata-rata total 40,68 dengan jumlah indikator pertanyaan sebanyak sepuluh menghasilkan nilai rata-rata jawaban sebesar 4,07 atau sering. Artinya, responden sepakat bahwa semakin sering memanfaatkan SPIP, semakin berkualitas informasi pertanggungjawaban yang dihasilkan.

Tabel 1.a menunjukkan serangkaian indikator yang membentuk variabel kompetensi aparat desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi hingga terendah berturut-turut adalah tanggung jawab, pelatihan, dan pengalaman.

Tabel 1.a. Deskripsi Variabel Kompetensi Aparat Desa

Indikator	N	Mean	SD
Tanggung Jawab	44	4.51	0.629
Pelatihan	44	4.04	0.863
Pengalaman	44	3.91	0.854

Selanjutnya, indikator untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana tersaji di Tabel 1.b. terbentuk dari 2 indikator utama, yaitu komputer dan jaringan internet. Dapat

diketahui bahwa jaringan internet memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan komputer.

Tabel 1.b. Deskripsi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator	N	Mean	SD
Komputer	44	4.156	0.841
Jaringan Internet	44	4.386	0.797

Adapun untuk variabel SPIP sebagaimana tersaji di Tabel 1.c, terbentuk dari serangkaian indikator utama. Jika dilihat dari nilai rata-rata tertinggi hingga terendah menunjukkan urutan informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, lingkungan pengendalian, pemantauan, dan penilaian resiko.

Tabel 1.c. Deskripsi Variabel SPIP

Indikator	N	Mean	SD
Lingkungan Pengendalian	44	3.99	0.89
Penilaian Resiko	44	3.69	1.28
Kegiatan Pengendalian	44	4.33	0.79
Informasi dan Komunikasi	44	4.45	0.73
Pemantauan	44	3.8	1.11

Variabel akuntabilitas dana desa sebagaimana tersaji di Tabel 1.d. terbentuk dari empat indikator utama. Secara berturut-turut dilihat dari nilai rata-ratanya, dua indikator yaitu dapat dibandingkan dan dapat dipahami telah memiliki nilai rata-rata yang sama. Berada di bawah keduanya adalah indikator andal, dan yang terakhir adalah relevan.

Tabel 1.d. Deskripsi Variabel Akuntabilitas Dana Desa

Indikator	N	Mean	SD
Relevan	44	4.35	0.73
Andal	44	4.49	0.75
Dapat Dibandingkan	44	4.57	0.69
Dapat Dipahami	44	4.57	0.69

Berdasarkan hasil pengujian selanjutnya, menunjukkan bahwa data penelitian ini telah normal, terbebas dari heteroskedasitas, dan multikolinearitas. Sebelum menguji signifikansi parsial setiap faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa, dilakukan analisis signifikansi nilai F terlebih dahulu sebagaimana tampak di Tabel 2.

Tabel 2. Signifikansi F

Signifikansi F	a = 0,05	Kondisi	Kesimpulan
0,00	0,05	Sig.F ≤ 0,05	Berpengaruh secara bersama-sama

Hasil pengujian signifikansi nilai F menunjukkan bahwa model regresi yang bermaksud menjelaskan pengaruh kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPIP dapat digunakan untuk memprediksi akuntabilitas dana desa. Setelah melewati hasil uji signifikansi nilai F, dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu uji signifikansi nilai t yang tampak pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Signifikansi t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
Konstanta	9,124	4,335		2,105	0,042
Kompetensi Aparatur	0,242	0,113	0,236	2,153	0,037
Pemanfaatan TI	0,391	0,140	0,402	2,795	0,008
SPIP	0,191	0,092	0,299	2,078	0,044

Tabel 3 menunjukkan keseluruhan hipotesis nol pada penelitian ini ditolak. Artinya Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan TI, dan SPIP secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,780	0,609	0,579	2,734

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa nilai dari *adjusted R square* adalah sebesar 0,579. Hal ini mengindikasikan bahwa 57,9% variasi akuntabilitas dana desa dipengaruhi oleh kompetensi aparat desa, pemanfaatan TI, dan SPIP. Selanjutnya, untuk mengetahui sumbangan masing-masing variabel independen tersebut terhadap variabel akuntabilitas dana desa dilakukan melalui perhitungan sumbangan efektif dengan rumus sebagai berikut:

$$SE_{xi} = \left| \frac{b_{xi} \times \text{Crossproduct} \times \text{Adjusted } R^2}{\text{Regression}} \right|$$

Keterangan:

- b_{xi} = koefisien b komponen x
- Crossproduct = crossproduct komponen x
- Regression = nilai regresi
- Adjusted R^2 = sumbangan efektif total

Besar sumbangan efektif masing-masing variabel dari perhitungan tersebut diketahui bahwa kompetensi aparatur mempunyai sumbangan efektif sebesar 11,5%, pemanfaatan teknologi informasi sebesar 27,1% dan SPIP sebesar 19,3%. Jadi, variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dana desa mulai nilai terbesar hingga terkecil adalah pemanfaatan TI sebesar 27,1%, dilanjutkan dengan SPIP sebesar 19,3%, dan kompetensi aparatur sebesar 11,5%.

Pembahasan

Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Dana Desa

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Jika dilihat dari deskripsi indikator di Tabel 1.a dan Tabel 1.d maka indikator tanggung jawab aparat desa (untuk variabel kompetensi aparat desa) memiliki rata-rata tertinggi yang mempengaruhi indikator dapat dibandingkan dan dapat dipahami yang juga memiliki nilai rata-rata tertinggi (untuk variabel akuntabilitas dana desa).

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang terdapat dalam diri individu untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, maupun kewenangan guna mencapai tujuan organisasi. Kompetensi aparatur desa pada penelitian ini dijelaskan oleh indikator tanggung jawab, pelatihan, dan pengalaman. Tanggung jawab menjelaskan kesadaran manusia mengenai tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab ju-

ga berarti berbuat sesuai kesadaran akan kewajibannya sebagai aparatur pemerintahan yang tertuang dalam deskripsi jabatan dan menjadi dasar untuk melaksanakan tugas. Tanggung jawab (*responsibility*) menjadi salah satu unsur yang membentuk etika birokrasi selain *equality*, *equity* dan *loyalty*. Tanggung jawab memiliki makna yang berbeda dengan pertanggungjawaban yang membentuk komponen akuntabilitas. Sesuai makna di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab mengarahkan individu untuk berkomitmen terhadap pekerjaannya dan menyelesaikan sesuai harapan organisasi. Pertanggungjawaban sebagai salah satu komponen akuntabilitas, menggambarkan penjelasan organisasi terhadap pemangku kepentingan atas program-program yang menjadi tanggung jawab organisasi.

Pada organisasi pemerintahan, konsep tanggung jawab dibedakan menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jabatan. Tanggung jawab pribadi menekankan pada tanggung jawab penggunaan wewenang untuk pelayanan publik (pendekatan perilaku), sedangkan tanggung jawab jabatan berkaitan dengan legalitas tindak pemerintahan (pendekatan kekuasaan pemerintahan). Adapun tanggung jawab pejabat pemerintah jika ditinjau dari moral dibedakan menjadi tanggung jawab hierarkis, tanggung jawab kolektif, dan tanggung jawab pribadi (Aditya, 2017). Tinjauan tanggung jawab tersebut menegaskan bentuk tanggung jawab akibat tindakan yang dilakukan oleh pejabat, baik secara pribadi maupun secara jabatan. Untuk itu, aparatur yang memahami jabatannya disebut sebagai aparatur yang bertanggung jawab.

Tanggung jawab dan akuntabilitas memiliki sinergi bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib melaporkan atau menjelaskan kegiatan atau program yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pemangku kepentingan. Mekanisme pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas dapat disajikan, salah satunya melalui media resmi milik pemerintah. Agar pelaporan keuangan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan memiliki struktur yang sama, salah satu upaya yang dikembangkan oleh pengawas keuangan dan kementerian yang terkait adalah menciptakan aplikasi keuangan yang terstandar. Hal ini dilakukan untuk mendorong terciptanya tanggung jawab sebagai gerakan moral pejabat pemerintah dengan memanfaatkan aplikasi keuangan desa untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan oleh pihak-pihak yang terkait serta memanfaatkan media elektronik resmi untuk menginformasikan secara luas. Tanggung jawab aparat pemerintahan yang dipermudah oleh pemanfaatan aplikasi keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (akuntabilitas).

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kecamatan Sumbergempol yang bertindak sebagai koordinasi penyaluran dana desa, didapatkan informasi bahwa secara umum aparatur desa yang berada di bawah koordinasi Kecamatan Sumbergempol mengerti tanggung jawab mereka untuk mengelola dana desa karena beberapa alasan yaitu takut akan sanksi tidak memperoleh kucuran dana desa di tahun selanjutnya dan terbantu dengan keberadaan aplikasi Siskeudes untuk pelaporan dana desa, meski dalam pengoperasiannya sering mengalami kesalahan.

Hasil penelitian Pujanira & Taman (2019) sejalan dengan temuan penelitian ini akan tetapi dilaksanakan pada pemerintahan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta menggunakan indikator kompetensi aparat pemerintah yang berbeda. Variabel kompetensi aparat pemerintah pada penelitian Pujanira & Taman (2019) dijelaskan oleh indikator pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Begitu pula hasil penelitian Ferina et al. (2016), Mada, Sarifudin (2017), R Fajri (2015), dan Makalalag et al. (2017) serupa dengan penelitian ini akan tetapi dilaksanakan pada pemerintahan daerah yang berbeda dan menggunakan pendekatan *non-positivistic*.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Dana Desa

PP No. 56 Tahun 2005 menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi berbantuan aplikasi yaitu Siskeudes, diharapkan memudahkan desa penerima transfer dana desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Bagi pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi informasi dapat memudahkan mereka menerima laporan keuangan yang telah disajikan dalam format tertentu dan pada waktu tertentu.

Pada penelitian ini, variabel pemanfaatan teknologi informasi dijelaskan melalui dua indikator utama (yaitu komputer dan jaringan internet) menghasilkan rata-rata jawaban responden tertinggi untuk pemanfaatan jaringan internet. Manfaat internet di bidang pemerintahan relatif beragam, salah satunya adalah mempermudah sistem administrasi. Sistem administrasi berbantuan internet menyediakan fasilitas pengiriman dan pengelolaan data secara *on line* sehingga memudahkan pengiriman data dan menyeragamkan sistem antar instansi pemerintah yang meliputi administrasi pelaporan, keuangan, kepegawaian dan lainnya. Pemanfaatan aplikasi Siskeudes juga

membantu mempercepat pelaporan dan memudahkan pengawasan hingga oleh pemerintah pusat karena menyediakan informasi *real time*. Jawaban aparat desa yang menyepakati pentingnya ketersediaan jaringan internet membantu penyusunan laporan pertanggung jawaban secara andal dan efisien (Harnoni, 2016; Winidyaningrum & Rahmawati, 2010). Pertanggungjawaban dana desa secara administratif berbantuan perangkat komputer dan didukung jaringan internet meningkatkan kualitas laporan keuangan dan hal ini memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami dan membandingkan laporan yang dihasilkan (Sukirman, Havid Sularso, 2013; Suyanto, 2005). Selain itu, meningkatnya kualitas laporan keuangan sebagaimana dikehendaki oleh PP no.71/2010 mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Secara luas, salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk ketersediaan jaringan internet yang telah dijalankan oleh Kabupaten Tulungagung adalah tersedianya laman [http://\(namadesa\).tulungagungdaring.id/](http://(namadesa).tulungagungdaring.id/) yang berisi informasi tentang profil, inovasi, produk, potensi, serta anggaran desa. Selanjutnya, hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Yudianto & Sugiarti (2017) dan Mayowan (2016) bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberi dampak bagi pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dibandingkan kedua penelitian tersebut adalah pada lokasi penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Akuntabilitas Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Sesuai PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, diantaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien dihasilkannya pelaporan keuangan yang andal, terjaganya keamanan asset daerah/negara, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP wajib dilaksanakan di setiap tingkatan pemerintahan baik di tingkat kementerian hingga pemerintahan daerah. Inspektoral daerah adalah pihak yang bertugas sebagai pengawas intern dalam rangka memastikan terselenggaranya SPIP di lingkup organisasi pemerintahan. Tugas pengawas internal di tingkat daerah adalah mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendayaan aset desa, sekaligus pembina dan pengawas penyelenggara pemerintah desa (UU No.6 Tahun 2014). SPIP dalam penelitian dijabarkan melalui serangkaian unsur pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Indikator utama SPIP yang memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu informasi dan komunikasi (lihat Tabel 1.c) mendukung terwujudnya akuntabilitas dana desa indikator utama dapat dibandingkan dan dapat dipahami (lihat Tabel 1.d). Informasi dan komunikasi sebagai salah satu unsur yang membentuk SPIP memiliki arti penting untuk mewujudkan tujuan pengendalian intern. Hal ini tidak terlepas dari kewajiban desa penerima Dana Desa untuk menggunakan aplikasi Siskeudes yang didalamnya telah dirancang pula Sistem Pengendalian Intern (built in internal control) untuk membantu pengelolaan keuangan desa.

Sistem berbantuan sistem informasi keuangan, dalam hal ini aplikasi Siskeudes dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri dengan fitur-fitur yang sederhana dan *user friendly*. Input atas transaksi hanya dilakukan sekali dan mampu menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan yang sesuai dengan perundangan (Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2019). Sistem ini berguna untuk mengidentifikasi, menangkap, dan melaporkan informasi keuangan dalam bentuk/format yang dipahami dan waktu yang ditentukan. Informasi yang mudah dipahami anggota organisasi, serta pemangku kepentingan, dan dipublikasikan pada waktu yang telah ditetapkan memudahkan anggota organisasi untuk menjalankan tanggung jawab mereka secara baik. Komunikasi adalah upaya untuk mengabarkan output informasi yang telah dihasilkan oleh Siskeudes baik kepada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi (Tadeko, 2017).

Informasi keuangan dalam bentuk atau format yang telah ditentukan sebagaimana diatur oleh regulasi yang berlaku memudahkan proses komunikasi kepada stakeholders organisasi karena dalam membaca informasi keuangan diharapkan stakeholders setidaknya memiliki pengetahuan akuntansi. Kemudahan memahami informasi inilah yang menghasilkan akuntabilitas dapat dipahami. Sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), informasi keuangan wajib disajikan minimal untuk kurun waktu dua tahun, yaitu tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Tujuan penyajian laporan keuangan dalam bentuk perbandingan dimaksudkan untuk memudahkan menilai capaian kinerja masa sekarang, mengevaluasi kinerja di masa lalu,

serta memprediksi kinerja di masa yang akan datang. Perbandingan dapat pula dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan laporan keuangan secara internal ditujukan untuk menilai konsistensi kebijakan akuntansi yang digunakan organisasi. Perbandingan eksternal dimaksudkan untuk membandingkan kinerja antar organisasi (Defitri, 2018). Untuk itu, mengkomunikasikan informasi keuangan dalam format yang telah ditetapkan sesuai standar, pada waktu tertentu, dan dalam bentuk perbandingan memudahkan tercapainya akuntabilitas indikator dapat dibandingkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yudianto & Sugiarti (2017) dan Widyatama et al. (2017) yang berhasil membuktikan peran pengendalian intern pada lingkup pemerintahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yudianto & Sugiarti (2017) antara lain: pertama, variabel dependen yang dipengaruhi oleh pengendalian intern. Kedua, penempatan variabel kualitas laporan keuangan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh pengendalian intern, sedangkan penelitian ini menempatkan akuntabilitas sebagai variabel dependen. Ketiga, jenis transfer pendapatan desa. Penelitian ini memilih pengelolaan keuangan jenis transfer pendapatan Dana Desa (DD) sedangkan penelitian sebelumnya memilih pengelolaan keuangan jenis transfer pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD).

Sumbangan Efektif Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa

Berdasarkan hasil perhitungan, sumbangan efektif setiap faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa pada penelitian ini berturut-turut dari nilai yang terbesar hingga terkecil ditunjukkan oleh pemanfaatan teknologi informasi, SPIP, dan kompetensi aparat desa. Urutan tersebut menjelaskan peran dari Siskeudes sebagai aplikasi untuk memudahkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun dengan mempertimbangkan regulasi tentang keuangan desa. Siskeudes dirancang secara terintegrasi dengan sistem pengendalian intern yang melekat dan mudah digunakan. Kompetensi menempati urutan sumbangan efektif yang paling kecil pengaruhnya terhadap akuntabilitas dana desa dikarenakan aparat desa yang menjadi responden di penelitian ini 79% atau sejumlah 35 responden memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/Yang sederajat dan sisanya adalah sarjana.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPIP mempengaruhi akuntabilitas dana desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ketiga variabel tersebut memiliki sumbangan efektif terbesar hingga terkecil yaitu pemanfaatan teknologi informasi, SPIP dan kompetensi aparat desa. Keterbatasan penelitian ini adalah memahami regulasi sebagai salah satu dasar mengembangkan indikator pada variabel penelitian yang melibatkan subyektifitas peneliti dan pembahasannya belum mengonfirmasi kembali pada regulasi yang dirujuk. Besar pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 57,9%, sehingga menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintahan

Saran

Saran yang diajukan bagi peneliti selanjutnya adalah memahami aturan pelaksana atas regulasi pemerintahan desa, keuangan desa dan SAP untuk memperkaya indikator variabel penelitian. Peneliti selanjutnya juga dapat meninjau kembali faktor-faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintahan desa seperti komitmen manajemen publik, budaya pemerintahan, karakteristik pengambilan keputusan pemerintahan, kesesuaian nilai-nilai akuntabilitas publik terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, dan lain-lain.

Implikasi

Mengingat sumbangan efektif variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini ditempati oleh pemanfaatan teknologi informasi, SPIP, dan kompetensi aparat desa maka implikasi praktis penelitian ini adalah melaksanakan pelatihan Siskeudes untuk membantu pertanggungjawaban keuangan desa secara akuntabel. Siskeudes telah dirancang dengan mempertimbangkan regulasi keuangan desa yang berlaku dan menyesuaikan dengan kaidah pengendalian intern pada lingkup pertanggungjawaban keuangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dipahami secara baik, ditandai dengan seringnya kesalahan dalam input data. Dari segi kompetensi aparat desa (jika ditinjau dari tingkat pendidikan) telah terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin mudah bagi mereka untuk beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi, begitupun sebaliknya. Secara teoritis, akuntabilitas tidak hanya mencerminkan telah

dilaksanakannya tata kelola pemerintahan yang baik, namun dapat pula diartikan sebagai kepatuhan manajemen publik terhadap regulasi yang berlaku dan pengelolaan keuangan publik secara beretika. Untuk itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan publik dapat pula dijelaskan menggunakan teori kepatuhan dan konsep etika publik.

DAFTAR RUJUKAN

- A Arens, A., J Elder, R., & S Beasley, M. (2016). Auditing dan Pelayanan Verifikasi. In *Jakarta: Erlangga*.
- Aditya, Z. F. (2017). Tanggung Jawab Moral Pejabat Melalui Pemanfaatan Media Cetak dan Elektronik dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari KKN. *Jurnal Universitas Paramadina*, 13(0), (1430-1450). Diambil dari <http://journal.paramadina.ac.id/index.php/upm/article/view/110>
- Cheng, R. H., Engstrom, J. H., & Kattelus, S. C. (2002). Educating government financial managers: University collaboration between business and public administration. *The Journal of Government Financial Management*, 51(3), 10–15. Diambil dari <http://search.proquest.com/docview/222437552?accountid=14484%5Cnhttp://www.tdnet.com/bgu/resolver/default.asp??genre=article&issn=15331385&volume=51&issue=3&title=The+Journal+of+Government+Financial+Management&spage=10&date=2002-10-01&atitle=Educating+gov>
- Defitri, S. Y. (2018). PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Delanno, G. F., & Deviani. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal WRA*, 1(1), 21–45.
- Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. (2019). Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES. Diambil dari Bpkp RI website: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Pengawasan-Kuangan-Desa-dengan-Aplikasi-SISKEUDES.bpkp>
- Dewi, R. A., Ramadhanti, W., & Wiratno, A. (2014). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undang-.* 3(4), 311–327.
- Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Administrasipublik.Studentjournal.Ub ...*, 3(7), 1099–1104. Diambil dari <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/920>
- Febrianto, I. M. B., Yuniarta, G. A., & Edy Sujana, S. E. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN BANGLI. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Ferina, I. S., Burhanuddin, & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14(3), 321–336.
- Harnoni. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jom FEKON*, 3(1), 1079–1093.
- Jorge, S., & Pattaro, A. F. (2011). Local Government financial transparency in Portugal and Italy: a comparative exploratory study on its determinants. *13th Biennial CIGAR Conference, Bridging Public Sector and Non-Profit Sector Accounting 9-10 June 2011, Ghent (Belgium)*, 4(June), 1–24.
- kemenkeu.go.id. (2018). Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Mencapai Rp149,31 Triliun. Diambil dari Kementerian Keuangan RI website: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>
- Mada, Sarifudin, kalangi lintje. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa , Komitmen Organisasi Pemerintah Desa , dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Vol 8, No, 106–115.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di

- kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 149–158. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15334>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Mayowan, Y. (2016). PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI DESA (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan). *Profit Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1), 14–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.9876/10.9876/VOL1ISSN1978-743X>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. , Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 § (2014).
- Pujanira, P., & Taman, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Rasul, S. (2002). Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. In *Jakarta: Detail Rekod*.
- Sukirman, Havid Sularso, E. S. N. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Dengan Pengendalian Intern Akuntansi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas). *Universitas Jenderal Sudirman*.
- Suyanto, M. (2005). *Pengantar Teknologi Informasi untuk Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tadeko, N. (2017). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Survey Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai). *Katalogis*, 5(2).
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 02(02), 1–20.
- Winidyaningrum, C., & Rahmawati. (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). *Srikipsi*, Vol. 13, hal. 1–28. Universitas Sebelas Maret.
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kapubaten Karawang). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 17(1), 1–18.